



RENCANA KERJA

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat diselesaikan. RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 ini, diucapkan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

DAFTAR ISI

KATAR PENGANTAR	-----
DAFTAR ISI	-----
BAB I PENDAHULUAN	-----
1.1. Latar Belakang	-----
1.2. Landasan Hukum	-----
1.3. Maksud dan Tujuan	-----
1.4. Sistematika Penulisan	-----
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	-----
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	-----
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	-----
2.3. Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-----
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	-----
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	-----
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	-----
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	-----
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	-----
3.3. Program Kegiatan	-----
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	-----
BAB V PENUTUP	-----

BAB I

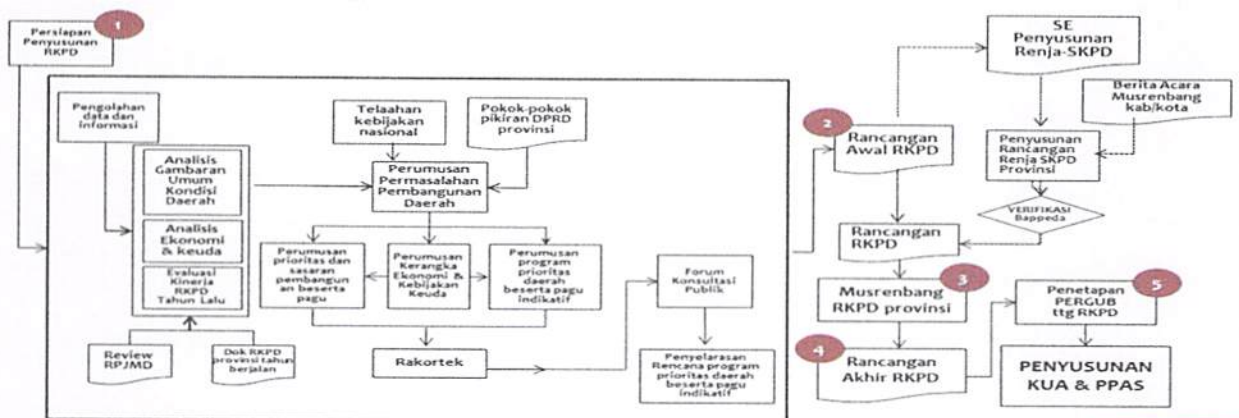
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

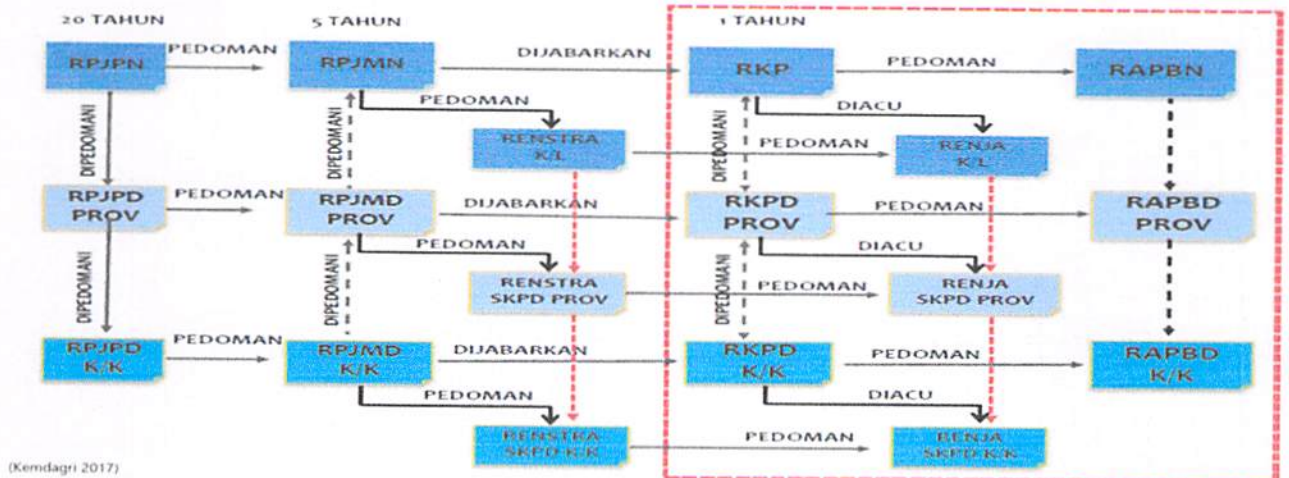
Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Proses penyusunan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dokumen Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi

terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara Nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
7. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
8. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);*
9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);*
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);*
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
13. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);*
14. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);*



15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);*
16. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);*
17. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;*
18. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);*
19. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);*
20. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
21. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);*
22. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);*

23. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);*
24. *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);*
25. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);*
26. *Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);*
27. *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);*
28. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);*
29. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);*
30. *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 33);*



31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja tahun lalu.

Review pada Renja tahun 2023 melihat pada capaian kinerja outcome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3) = (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,80 %	10,34%	10,40 %	10,40 %	100	15,20 %	15,20 %	102,7027
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %		100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang sesuai dengan kearifan budaya lokal	1 buah		N/A	N/A	#VALUE!	1 buah	1 buah	100
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Anggota POKJA kampung KB yang terlibat dalam mekanisme operasional program KKBPK	216 Orang		216 Orang	216 Orang	100	216 Orang	216 Orang	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dana operasional	24 Balai		24 Balai	24 Balai	100	24 Balai	24 Balai	100
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media elektronik yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	1 media		1 media	1 media	100	1 media	1 media	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE yang tersedia	2 Buah		3 Buah	3 Buah	100	2 Buah	2 Buah	100
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media massa cetak yang terlibat dalam KIE Program KKBPK	1 media		1 media	1 media	100	1 media	1 media	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	3 POKJA		1 POKJA	1 POKJA	100	3 POKJA	3 POKJA	100
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah OPD yang melakukan intervensi pembangunan kampung KB	10 OPD		5 OPD	5 OPD	100	10 OPD	10 OPD	100
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4 Mitra		4 Mitra	4 Mitra	100	4 Mitra	4 Mitra	100
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penurunan Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	71,16 %		60 %	60 %	100	72,16 %	72,16 %	101,4053
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapatkan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK	38 orang		38 orang	38 orang	100	38 orang	38 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64 %	80%	80,19 %	80,19 %	100	64 %	64 %	100
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95 %		16 %	16,35 %	100	94 %	94 %	98,94737
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	28,71 %	43%	42,00 %	42 %	100	30,37 %	30,37 %	105,782
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	84,43 %		83,23 %	83,23 %	100	83,73 %	83,73 %	99,17091
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes teregister yang mendapat ketersediaan atau distribusi alat dan obat kontrasepsi	156 Faskes		156 Faskes	156 Faskes	100	156 Faskes	156 Faskes	100
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Pria yang dilayani	10 orang		N/A	N/A	#VALUE!	10 orang	10 orang	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,74 %		46,48 %	46,48 %	100	42,74 %	42,74 %	100
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus kegagalan penggunaan MKJP yang ditangani	30 kasus		40 kasus	40 kasus	100	30 kasus	30 kasus	100
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana penunjang pelayanan KB	5 Unit		25 Unit	25 Unit	100	20 Unit	20 Unit	400
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	3,25 %		1,59 %	1,59 %	100	2,86 %	2,86 %	88

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	2 %	1,20%	1,16 %	1,16 %	100	1,98 %	1,98 %	102,5907
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	17 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	100	17 Dokumen	17 Dokumen	100
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen data Base Program KKBPK	1 Dokumen		N/A	N/A	#VALUE!	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen		N/A	N/A	#VALUE!	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga	1 Dokumen		N/A	N/A	#VALUE!	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	16,91 %	16,54%	17,81 %	17,81 %		17,01 %	17,01 %	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21 Tahun		35,31 Tahun	35,31 Tahun	100	21 Tahun	21 Tahun	100
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola POKTAN yang dibina	38 orang		38 orang	38 orang	100	38 orang	38 orang	100
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader POKTAN yang dibina	1152 orang		1152 orang	1152 orang	100	1152 orang	1152 orang	100
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	27 unit		12 unit	12 unit	100	21 unit	21 unit	77,77778
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang difasilitasi penyediaan biaya operasionalnya	4 kelompok		N/A	N/A	#VALUE!	5 kelompok	5 kelompok	125
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi serta pembinaan	96 Kelompok		96 Kelompok	96 Kelompok	100	96 Kelompok	96 Kelompok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat generasi berencana	8 kelompok		9 kelompok	9 kelompok	100	9 kelompok	9 kelompok	112,5
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	40 %		N/A	N/A	#VALUE!	20 %	20 %	50
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1 lembaga		N/A	N/A	#VALUE!	1 lembaga	1 lembaga	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUSPAGA yang terbentuk	1 lembaga		N/A	N/A	#VALUE!	1 lembaga	1 lembaga	100
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	2 indikator		N/A	N/A	#VALUE!	1 indikator	1 indikator	50
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang melakukan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1 Mitra		1 Mitra	1 Mitra	100	1 Mitra	1 Mitra	100
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE KG dan Perlindungan anak yang tersedia	3 buah		3 buah	3 buah	100	3 buah	3 buah	100
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Masyarakat	0 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A	78,61 Point		78,37 Point	78,37 Point	100	78,49 Point	78,49 Point	99,84735
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	100	360 Dokumen	360 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntansi SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	350 Dokumen		350 Dokumen	350 Dokumen	100	350 Dokumen	350 Dokumen	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	56 Orang		56 Orang	56 Orang	100	56 Orang	56 Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	90 Dokumen		77 Dokumen	77 Dokumen	100	77 Dokumen	77 Dokumen	85,55556
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	100	48 Dokumen	48 Dokumen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	15 Unit		8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	8 Unit	53,33333
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	15 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	9 Dokumen	60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	45 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	17,77778
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	0 unit		1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	1 unit		1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	6 unit		6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang disusun	1191 Dokumen		1191 Dokumen	1191 Dokumen	100	1191 Dokumen	1191 Dokumen	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas (Penyedia Jasa Layanan Kebersihan Kantor) yang difasilitasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100	1 Orang	1 Orang	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang di kelola/ di tata	1187 Dokumen		1187 Dokumen	1.187 Dokumen	100	1.187 Dokumen	1.187 Dokumen	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	11 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	109,0909
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD	75 %		7,72 %	7,72 %	100	71,43 %	71,43 %	95,24
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	50 OPD		31 OPD	31 OPD	100	40 OPD	40 OPD	80
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan analisa PPRG dalam penyusunan anggaran	50 OPD		31 OPD	31 OPD	100	40 OPD	40 OPD	80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	55 Buah		38 Buah	38 Buah	100	50 Buah	50 Buah	90,90909
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang terfasilitasi PUG termasuk PPRG	50 OPD		31 OPD	31 OPD	100	40 OPD	40 OPD	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	0,10 %		0,00 0		#DIV/0!	0,9 %	0,9 %	900
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 lembaga		1 lembaga	1 lembaga	100	3 lembaga	3 lembaga	100
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	90 orang		90 orang	90 orang	100	90 orang	90 orang	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah	1 lembaga		1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana KIE yang tersedia	3 buah		2 buah	2 buah	100	3 buah	3 buah	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	8 %		8,50 %	8,50 %	100	8,49 %	8,49 %	100,2361
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 media		1 media	1 media	100	2 media	2 media	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3) = (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	24 orang		20 orang	20 orang	100	24 orang	24 orang	100
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %		100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	12 Kasus		22 Kasus	22 Kasus	100	12 Kasus	12 Kasus	100
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media publikasi data gender dan anak	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media	100	2 Media	2 Media	100
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan	0,35 %		0,04 %	0,04 %	100	0,037 %	0,037 %	10,57143
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 media		1 media	1 media	100	1 media	1 media	50
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerjasama Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	50
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100	2 Lembaga	2 Lembaga	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100	2 Lembaga	2 Lembaga	100
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	12 Laporan		58 Laporan	58 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	1 %		32,09 %	32,09 %	100	87,50 %	87,50 %	9545,107
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	15 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100	12 Lembaga	12 Lembaga	80
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah	12 Forum Anak		1 Forum Anak	1 Forum Anak	100	1 Forum	1 Forum	8,333333
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kecamatan yang terbentuk	15 Forum Anak		2 Forum Anak	2 Forum Anak	100	12 Forum	12 Forum	80
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	7 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	100	5 Lembaga	5 Lembaga	71,42857
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk / ditetapkan	6 Sekolah		2 Sekolah	2 Sekolah	100	4 Sekolah	4 Sekolah	66,66667
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Pemenuhan Hak Anak yang tersedia	3 buah		2 buah	2 buah	100	3 buah	3 buah	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	1 lembaga		1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3) = (2021)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang tua yang mendapatkan layanan Konsultasi Pengasuhan Anak	15 orang		10 orang	10 orang	100	10 orang	10 orang	66,66667

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki lima indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Ukuran keberhasilan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai wujud pelayanan perangkat daerah yang diemban ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama, adapun analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 2.2. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi			28,7	28,8	29,9	29,1	28,7	28,8	29,9	29,1	
1.1.	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A			A	BB	A	A	A	BB	A	A	
1.1.1.	Peningkatan nilai Sakip DP2KBP3A			81,79	82,79	83,79	84,79	81,79	82,79	83,79	84,79	
2	Indeks Pembangunan Gender			93,65	93,957	94,19	94,48	93,65	93,957	94,188	94,481	
2.1.	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD			17,76	11	12	13	17,75502	11	12	13	
2.1.1.	Peningkatan persentase PD yang menerapkan anggaran Responsif Gender Melalui APBD			26	35	50	75	26	35	50	75	
2.1.2.	Peningkatan persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya			0,04	0,02	0,036	0,040	0,035928	0,023952	0,035928	0,03992	
2.1.3.	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga			20,00	40,00	60,00	80,00	20	40	60	80	
2.1.4.	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani			9,18	8,47	8,45	8,43	9,18171	8,47	8,45	8,43	
3	Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak			430,00	615,00	661,00	707,00	430	615	661	707	
3.1.	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak			84,55	43,02	7,48	6,96	84,54936	43,02326	7,479675	6,959153	
3.1.1	Penurunan persentase anak korban tindak kekerasan			0,025	0,035	0,034	0,032	0,024861	0,035	0,034	0,032	
3.1.2	Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA			87,5	91,67	95,83	100,00	87,5	91,66667	95,83333	100	
3.1.3	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kesehatan (AHI)			0,737	0,742	0,747	0,751	0,737	0,742	0,747	0,751	
4.1.	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	√		1,985	2,79	2,78	2,77	1,985	2,79	2,78	2,77	
4.1.1	Penurunan angka keluarga pra sejahtera			7,85	16,91	16,81	16,71	7,849868	16,91	16,81	16,71	
4.1.2	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	√		8,96	14,80	14,3	13,9	8,962816	14,8	14,3	13,9	
4.1.3	Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	√		81,98	64,44	64,44	64,44	81,97802	64,44	64,44	64,44	
4.1.4	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	√		1,11	1,93	1,88	1,84	1,105156	1,93	1,88	1,84	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (outcome) dan target kinerja kegiatan (output) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.
- b. Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang masih rendah, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.

- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai stakeholder;
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

Masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan pendekatan bagian-bagian, yaitu:

TABEL 2.3.

Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat
2.	Keluarga Berencana	3. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local 4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan Keluarga Berencana belum optimal 5. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal 6. Persentase Unmeet Need masih tinggi 7. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 8. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	Keluarga Sejahtera	7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9. Kualitas kader/ tenaga pendamping belum optimal 10. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 11. Pembinaan terhadap kader belum optimal - Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)
4.	Kualitas Hidup Perempuan	9. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah 10. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 11. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Anggaran yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan kurang optimal 14. Bahan informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Perlindungan perempuan	12. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan 14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	15. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak 17. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang
7.	Sistem Data Gender dan Anak	18. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	17. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
8.	Pemenuhan Hak Anak	19. Pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	18. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
9.	Perlindungan Khusus Anak	21. Pencegahan kekerasan terhadap anak 22. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 23. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	19. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 20. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang

Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”, untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut.

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berakarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renja DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki kontribusi untuk mewujudkan visi bupati dan wakil bupati pada misi pertama yaitu SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS, misi ke dua SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI, misi ke tiga SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI dan misi ke empat yaitu SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA.

Selanjutnya dari uraian-uraian diatas diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Tantangan dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan DP2KBP3A

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
1	Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menguatnya tuntutan publik akan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan perangkat daerah yang semakin baik	Peraturan/Keputusan/instruksi Bupati yang mengatur/ menetapkan tentang intervensi atau keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung program KKBPK dan PPPA
			Pencanangan Kabupaten Sumbawa Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) serta meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dan perangkat daerah untuk menuju kabupaten layak anak

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
2	Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Lemahnya kapasitas kelembagaan	Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif. Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
3	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya sistem evaluasi pada tingkat perangkat daerah	Semakin menguatnya tuntutan akan ketersediaan sistem, yang memberikan ruang kreasi bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja anak, serta munculnya kekerasan di media online
4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Tema pembangunan RKPD 2024 yaitu **“Peningkatan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Layanan Dasar yang Berkeadilan”**, dimana dukungan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam terwujudnya tema pembangunan tersebut adalah melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Peningkatan ekonomi melalui pengembangan produk unggulan daerah dan

ekonomi kreatif, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya, Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, khususnya yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, dan program / kegiatan, serta indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang menjadi catatan untuk disesuaikan pada perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2024, disajikan sebagai berikut :



Tabel 2.5. T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	52,73 %	89.450.000,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	52,73 %	89.450.000,00	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah program / kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	38 Buah	60.205.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah program / kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	38 Buah	60.205.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.660.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.660.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9.700.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9.700.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender	1 Perangkat Daerah	8.430.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender	1 Perangkat Daerah	8.430.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	16.415.000,00	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	16.415.000,00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	90 Orang	25.850.000,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	90 Orang	25.850.000,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25.850.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25.850.000,00	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	1 Lembaga	13.395.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	1 Lembaga	13.395.000,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	13.395.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	13.395.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5,55 %	180.890.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5,55 %	180.890.000,00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Media	55.970.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Media	55.970.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	55.970.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	55.970.000,00	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	1	84.140.000,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	1	84.140.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	84.140.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	84.140.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Lembaga	40.760.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Lembaga	40.760.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang	40.760.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Orang	40.760.000,00	

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	0,8	60.905.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	0,8	60.905.000,00	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	4 Indikator	40.930.000,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	4 Indikator	40.930.000,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	14.170.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	14.170.000,00	
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	15.670.000,00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	15.670.000,00	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.090.000,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.090.000,00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1 Lembaga	19.975.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1 Lembaga	19.975.000,00	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.975.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.975.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	1	22.730.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	1	22.730.000,00	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	1	22.730.000,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	1	22.730.000,00	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	10.895.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	10.895.000,00	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.835.000,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.835.000,00	

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	60,59 %	148.674.000,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Peningkatan persentase Pemenuhan Indikator KLA	60,59 %	148.674.000,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	7 Lembaga	48.066.000,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	7 Lembaga	48.066.000,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	28.111.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	28.111.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.955.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.955.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	3 Lembaga	100.608.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	3 Lembaga	100.608.000,00
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.230.000,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.230.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.475.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.475.000,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.100.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.100.000,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	49.603.000,00	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	49.603.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,032 %	305.283.500,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,032 %	305.283.500,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.845.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.845.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.480.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.480.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.283.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.283.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.355.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.355.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	8 Dokumen	6.292.016.229,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	8 Dokumen	6.292.016.229,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	6.193.925.229,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	6.193.925.229,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	81.970.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	81.970.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	4.415.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	4.415.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.296.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.296.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.380.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.380.000,00
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.190.000,00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.190.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.145.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.145.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.695.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.695.000,00

[illegible]

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84 %	1.244.317.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84 %	1.244.317.000,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk	1 Dokumen	56.360.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk	1 Dokumen	56.360.000,00
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.800.000,00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.800.000,00
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	3 Kegiatan	14.560.000,00	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	3 Kegiatan	14.560.000,00
Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.187.857.000,00	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.187.857.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	64.200.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	64.200.000,00
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	264.100.000,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	264.100.000,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	848.065.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	848.065.000,00
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	34 Unit	7.192.000,00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	34 Unit	7.192.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	3 Laporan	6.400.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	3 Laporan	6.400.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	13,9 %	8.773.970.920,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	13,9 %	8.773.970.920,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1	1.782.335.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1	1.782.335.000,00
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 Laporan	79.848.000,00	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 Laporan	79.848.000,00

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan	1.174.440.000,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan	1.174.440.000,00
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	311.535.000,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	311.535.000,00
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	98.650.000,00	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen	98.650.000,00
Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi	119.864.000,00	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi	119.864.000,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0,2567	508.065.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0,2567	508.065.000,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	960 Orang	508.065.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	960 Orang	508.065.000,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,7274	4.755.380.920,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,7274	4.755.380.920,00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	50.080.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	50.080.000,00

	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3075 Orang	1.851.139.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3075 Orang	1.851.139.000,00	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	7 Laporan	15.965.000,00	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	7 Laporan	15.965.000,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	59 Unit	2.784.189.920,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	59 Unit	2.784.189.920,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Laporan	21.527.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Laporan	21.527.000,00	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	22.240.000,00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	22.240.000,00	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	120 Orang	10.240.000,00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	120 Orang	10.240.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 OPD	1.728.190.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	10 OPD	1.728.190.000,00	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 Dokumen	1.205.670.000,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 Dokumen	1.205.670.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Kampung	522.520.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Kampung	522.520.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	16,71 %	3.060.502.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	16,71 %	3.060.502.000,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22 Tahun	3.060.502.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22 Tahun	3.060.502.000,00	

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	68.290.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	68.290.000,00
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	360.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	360.000.000,00
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	480 Orang	68.042.000,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	480 Orang	68.042.000,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1178 Orang	2.564.170.000,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1178 Orang	2.564.170.000,00

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mensinergikan antara Top Down dan Bottom Up. Usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan dari tingkat desa dan kecamatan selanjutnya dimatangkan pada tingkat Kabupaten merupakan perencanaan yang bersifat Bottom Up. Selanjutnya usulan tersebut dianalisis apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau tidak untuk selanjutnya dilakukan penilaian atas kebutuhan tersebut berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang kabupaten tidak ada usulan yang disampaikan ke Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa yang selarasa dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.6. T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
- b. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
- d. Meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan
- e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi

Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak melalui PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan PUG (Pengarusutamaan Gender) meliputi upaya-upaya penanganan isu-isu strategis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap anak (KTA)
5. Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
6. Pencegahan dan penanganan Pornografi anak online.

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional dan di Daerah dilaksanakan dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (*world fit for Children*) dilaksanakan dengan strategi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan internal
2. Penguatan kapasitas Kelembagaan eksternal, melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan *capacity building* PUG dan ARG serta Hak Anak;
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai elemen dan *move*;
4. Mendorong Implementasi kebijakan yang responsif gender dan peduli hak anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan. Pada tabel berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Perangkat Daerah memastikan kontribusinya terhadap target indikator sasaran daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Peningkatan Indeks Kesehatan	0,751
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,77
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	9.502
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	88.00
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	29.1
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	A
			Indeks Pembangunan Gender	94,48
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	13.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	707
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	6.96

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran dari RPJMD dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program rutin dan Sembilan program teknis yang terbagi dalam lima kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

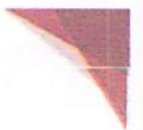
Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Peningkatan Indeks Kesehatan	2	6	30
Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	2	3	10
Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	1	6	29
Indeks Pembangunan Gender	3	6	13
Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	2	6	10

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung lima indikator sasaran pada RPJMD, dari seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang ada, satu program yang bersifat terfokus pelaksanaannya untuk pembiayaan rutin Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Sembilan program lainnya sifat pelaksanaannya tersebar pada 24 kecamatan.

Selanjutnya untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan beserta sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran, adapun total kebutuhan anggaran untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. **20.803.608.849** dari total tersebut sebagian

besar bersumber dari DAK (DAK Fisik Reguler dan DAK Non Fisik BOKB) dan sebagiannya lagi bersumber dari DAU.

Pada Tabel berikut disajikan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 beserta besaran rencana pagu anggaran dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :



[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	6.430.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	OPD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	16.415.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	OPD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-			90 Orang	25.850.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	25.850.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAOU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	-			1 Lembaga	13.395.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat 1 Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Bertahan, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	13.395.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat 1 Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Bertahan, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan risiko kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	8,41 %			8,55 %	180.890.000,00						8,41 %	0,60	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah (dinas pppn) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			2 Media	65.970.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat 1 Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Bertahan, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	65.970.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat 1 Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Bertahan, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KIKERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	-			100 %	84.140.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Layanan	84.140.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kd/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-			2 Lembaga	40.780.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				120 Orang	40.780.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kd/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	100 %			80 %	60.905.000,00						100 %	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KIKERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuafitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperluas Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	48.803.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuafitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperluas Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,030 %			0,032 %	305.283.500,00						0,030 %	0,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah/kota (dinas pppe) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-			2 Media	54.035.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuafitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperluas Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
			Jumlah SDM yang mempromosikan advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				300 Orang	54.035.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuafitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperluas Struktur Masyarakat Sumbawa Yang Beriman, Aman dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.480.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pembangu nan Tata Kelola Pem erintahan Daerah (PD-5) Memperluas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBPA3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.283.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Memperluas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBPA3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8.355.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pembangu nan Tata Kelola Pem erintahan Daerah (PD-5) Memperluas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBPA3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pernerbitaan dan Tindak Lanjut Pernerbitaan				1 Dokumen	2.180.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pembangu nan Tata Kelola Pem erintahan Daerah (PD-5) Memperluas t Reformasi Birokrasi dan Akunta bilisasi Kinerja menuju pen ingkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBP3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				3 Laporan	2.145.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pembangu nan Tata Kelola Pem erintahan Daerah (PD-5) Memperluas t Reformasi Birokrasi dan Akunta bilisasi Kinerja menuju pen ingkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBP3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0003	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.695.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	Pembangu nan Tata Kelola Pem erintahan Daerah (PD-5) Memperluas t Reformasi Birokrasi dan Akunta bilisasi Kinerja menuju pen ingkatan pelayanan publik yang berkualitas	ASN DP2KBP3A		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	846.065.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Balai penyuluhan KB		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.0015		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				34 Unit	7.192.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Balai penyuluhan KB		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.0018		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				3 Laporan	6.400.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Balai penyuluhan KB		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PERSINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	64 % 13.50 %			13,9 %	8.773.970.920,00						64 % 13.50 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REHJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REHJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar Isi pesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	-			100 %	1.782.335.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperku a Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0003	Pengendalian Program KKBPk														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk				6 Laporan	70.848.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperku a Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24 Laporan	1.174.440.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperku a Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minibok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minibok)				10 Laporan	311.535.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangu nan Manusia (PD-2) Memperku a Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	98.650.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saling	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh policy advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				15 Organisasi	110.854.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saling	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-			25,67 %	503.065.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saling	PKB, PPKBD dan Sub PPKBD	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)				950 Orang	503.065.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saling	PKB, PPKBD dan Sub PPKBD		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			72.74 %	4.756.380.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	50.080.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3075 Orang	1.851.139.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				7 Laporan	15.985.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesehatan KB Prio				120 Orang	10.240.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP/K Ber-KB	-			10 OPD	1.728.180.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3 Dokumen	1.205.670.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikut Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				34 Kampung	\$22.520.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Memperkuat Layanan Dasar Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uraha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				480 Orang	68.042.000,00	Semua Kota Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas untuk mem perkuat ketahanan ekonomi dan pangan	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDONGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1176 Orang	2.564.170.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia (PD-2) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas untuk mem perkuat ketahanan ekonomi dan pangan	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDONGAN ANAK
			JUMLAH					20.803.608.849,00								0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan beserta program dan pendanaannya. Pada Tabel berikut disajikan Rencana Kinerja beserta Program dan pendanaan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rencana Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.77
2	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	Peningkatan Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	88.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	A
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	13.00
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	6.96

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.918.886.429	
2	Program Pengendalian Penduduk	1.244.317.000	
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	8.773.970.920	
4	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	3.060.502.000	
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	89.450.000	
6	Program Perlindungan Perempuan	180.890.000	
7	Program peningkatan Kualitas Keluarga	60.905.000	
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	22.730.000	
9	Program Pemenuhan Hak Anak	146.674.000	
10	Program Perlindungan Khusus Anak	305.283.500	
	J U M L A H	20.803.608.849	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas provinsi maupun nasional.

Dokumen Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta peran aktif para stakeholder.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2024, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, serta melalui proses serta mendapatkan pertimbangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumbawa



Sumbawa Besar,

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005